

ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

ANNA YULIANITA

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

This study entitled Analysis of Main Economic Sectors in Muara Enim regency. The purpose of this research is to identify the sectors untuak seeded anything that can be developed in the economy in the Muara Enim regency period from 2001 until 2008.

Data used in this research is secondary data derived from various sources. This research was shaped desriptif and uses quantitative techniques desriptif. Quantitative analysis using the calculation technique Location Quotient (LQ) and shift share analysis.

The result shows that (1) there is one sector and the three sub-sectors that can be used as the mainstay of superior, as indicated by an $LQ > 1$ namely the Mining Sector and the results, sub-sectors of Food Crops, Forestry sub-sector sub-sector of Electricity, Rail Transportation subsector. (2) the shift share analysis there are four leading sectors namely Agriculture sector, Mining sector and results, Manufacturing Industry sector and building sector, which is positive. Figures elasticity of 5.64, this means that every change of one percent on the real sector, the service sector will increase by 5.64 percent. It is expected that all these leading sectors to balance the economic growth of the Muara Enim regency.

Keywords: Competitive Sector, Location Quotient, Shift Share, Elasticity, Muara Enim

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokal, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju.

Bila memperbandingkan pertumbuhan antara daerah, maka akan ditemui kenyataan bahwa ada daerah yang tumbuh lebih cepat diantaranya disebabkan oleh struktur ekonominya sebagian besar mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sebaliknya bagi daerah yang pertumbuhannya lambat, sebagian besar sektor ekonominya mempunyai laju pertumbuhan yang lambat.

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting

dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Di samping analisis pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dapat pula digunakan untuk menentukan arah pembangunan yang akan datang.

Arsyad menjelaskan bahwa setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada berupaya menginventarisir potensi sumber daya ada untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad,1999:109).

Keberhasilan pemerintah dalam membangun daerah ini diukur dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah Otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang 22 Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar (*local discretion*) kepada daerah untuk merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat (*local needs*).

Sejak Otonomi Daerah tersebut diberlakukan, peran pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri semakin besar. Tuntutan untuk mampu membiayai urusan rumah tangga tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah daerah beserta perangkatnya harus bekerja keras agar mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah untuk pelayanan terhadap masyarakat.

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) yang rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap totalitas perekonomian maka sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus akan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya angka PDRB sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan sumber daya yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah berkaitan erat dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi terhadap wilayah perencanaan dan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah perencanaan meliputi berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki daerah. Perencanaan pembangunan suatu daerah diarahkan untuk mengelola sumber daya daerah sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim didukung adanya sektor ekonomi unggulan yang dapat dijadikan potensi daerah bagi perkembangan daerah tersebut.

Menurut Taufik dan Saleh (2000:2) hal ini sangat penting karena sektor tersebut dapat memberikan dua sumbangan sebagai berikut:

- Secara langsung menimbulkan kenaikan pada pendapatan faktor-faktor produksi daerah dan pendapatan daerah.
- Menciptakan permintaan atas produksi industri lokal.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Muara Enim mempunyai wilayah cukup luas dan mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah dan sumber yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi ini, peran pemerintah sangat besar dalam memberikan kontribusi dengan suatu kebijakan untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan memprioritaskan sektor unggulan yang ada di daerah tersebut.

Kewenangan otonomi luas yang mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, maka daerah harus mengembangkan sumber dayanya terutama sumber daya manusia dalam upaya untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah Kabupaten Muara Enim sehingga tidak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.

Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya pembangunan antar daerah dan kawasan. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut dilakukan melalui penempatan tata ruang yang bertujuan untuk mengembangkan pola dan struktur ruang nasional melalui pendekatan wawasan dan implementasikan melalui penetapan kawasan andalan (Kuncoro 2000:215).

Kawasan adalah merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*Prime wover*) yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan dengan daerah lainnya dalam suatu provinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (*hinterland*) (Kuncoro 2000:215-216).

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar, melalui pemberdayaan sektor/subsektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang, maka penulis mengambil judul Analisis Sektor-sektor Unggulan di Kabupaten Muara Enim guna mengkaji sektor ekonomi apa saja yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah maka pengertian daerah *region* sendiri berbeda-beda tergantung aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi oleh Arsyad (1999: 107) , daerah mempunyai 3 (tiga) pengertian yaitu :

1. Daerah dianggap satu ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang kesamaan, sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografis, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian sifat ini disebut daerah homogen.

2. Daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut modal.
3. Daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu Provinsi, satu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini berdasarkan kepada pembagian administrasi suatu negara. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah administrasi.

Pengertian yang ketiga lebih banyak digunakan karena dalam melaksanakan kebijakan diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah, sehingga lebih praktis bila suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi yang ditentukan berdasarkan kesatuan administratif agar lebih mudah dikelola dan diberdayakan. Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di Indonesia pada umumnya menggunakan *planning region*.

Arsyad (1999:115) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Suatu daerah terbagi kedalam wilayah-wilayah atau sub-sub wilayah. Misalnya daerah provinsi dalam wilayah tersebut masih terbagi atas berbagai sub wilayah seperti kabupaten atau kota. Pertumbuhan daerah tersebut akan ditentukan oleh faktor-faktor utama yang antara lain: 1) sumber daya alam yang tersedia, 2) tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam, 3) adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang seperti transportasi, komunikasi, 4) tersedianya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam, dan 5) tersedianya kualitas sumber manusia untuk pengelolaan teknologi.

Sumber daya alam dapat berupa lahan pertanian, bahan tambang atau galian yang dapat mendukung industri pengolahan atau sumber daya alam lainnya yang akan mempunyai arti penting bagi daerah yang memilikinya. Daerah tersebut akan berspesialisasi dalam suatu sub sektor atau sektor dan akan mempunyai keuntungan absolut bagi daerah lainnya. Jika daerah tersebut dikelola secara baik dengan modal dan teknologi yang memadai maka daerah tersebut dapat diharapkan akan mengalami pertumbuhan dengan pesat.

Menurut pandangan Adam Smith bahwa sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat, jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Sukirno (1985: 19) menyebutkan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat perekonomian lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya dengan kata lain perkembangan akan tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Todaro (2000 : 111) menyatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, pertama : akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis

investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia, kedua; pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendiri membawa pertumbuhan angkatan kerja, ketiga; kemajuan teknologi.

Teori Basis Ekonomi

Richardson dalam Taroman (2000:18) mengembangkan suatu teori ekonomi regional yaitu basis ekonomi. Dalam teori basis ekonomi atau teori basis-ekspor (*economic base theory*), menyatakan bahwa penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Teori basis ekonomi ini pada intinya membedakan sektor basis dan aktifitas sektor non basis.

Aktifitas sektor basis yang mampu secara luas menjual produknya baik di dalam maupun di luar daerah akan mempengaruhi pertumbuhan sektor tersebut dan menentukan pembangunan menyeluruh bagi daerah tersebut termasuk peningkatan kesempatan kerja yang berpengaruh pada pendapatan regional. Aktifitas sektor non basis merupakan sektor sekunder yang artinya tergantung pada perkembangan yang terjadi pada sektor basis yang akan menyebabkan terjadinya perubahan pada konsumsi dan investasi di daerah. Dengan kata lain kedua sektor tersebut mempunyai hubungan dengan permintaan dari luar wilayah. Sektor basis berhubungan secara langsung sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung. Apabila permintaan dari luar meningkat maka sektor basis akan meningkat dan juga akan mengembangkan sektor non basis. Setiap pertumbuhan sektor basis dan non basis memiliki efek ganda terhadap perekonomian wilayah.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini berdasarkan pada permintaan eksternal dan bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun secara global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

Cara yang paling mudah untuk menaksir besarnya basis adalah dengan jalan menghitung untuk setiap sektor yang mempunyai $LQ > 1$. Indeks pekerja surplus (yakni selisih antara tenaga kerja pada industri nasional yang merupakan bagian pranata bagi daerah yang bersangkutan).

Teknik LQ lebih lazim digunakan dalam studi-studi basis empiris LQ. Asumsinya adalah bahwa jika suatu daerah lebih berspesialisasi daripada daerah yang bersangkutan dalam memproduksi suatu barang tertentu, maka daerah tersebut dapat mengekspor barang itu sesuai dengan tingkat spesialisasinya dalam memproduksi barang tersebut.

Konsep Pembangunan Regional

Salah satu aspek pembangan regional adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi serta perubahan status kerja buruh karena itu konsep pembangunan regional sangat tepat bila didukung dengan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, teori pusat pertumbuhan dan pembangunan manusia.

Dari aspek ekonomi oleh Arsyad (1999:107) daerah mempunyai 3 pengertian yaitu:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budayanya, geografis, dan sebagainya, daerah ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi, daerah ini disebut daerah nodal.

3. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara.

Keunggulan Komperatif dan Keunggulan Kompetitif Wilayah

Dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah terdapat dua faktor utama. Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau yang mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa yang akan datang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa yang akan datang, walaupun di saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik. Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komperatif (*comperative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Istilah keunggulan komperatif (*comperative advantage*) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1917. Ricardo membuktikan bahwa ada dua wilayah saling berdagang, masing-masing menspesialisasikan diri untuk mengekspor barang yang memiliki keunggulan komperatif, maka kedua wilayah tersebut akan beruntung. Keunggulan komperatif lebih menekankan kepemilikan sumber ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan suatu daerah, seperti kepemilikan sumberdaya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain-lain.

Berkaitan dengan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif, maka berdasarkan kegiatan ekonomi wilayahnya dapat saja memiliki kedua jenis keunggulan tersebut secara bersama-sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh satu atau gabungan beberapa faktor berikut ini (Tarigan, 2000 : 88): 1) Memiliki potensi sumber daya alam; 2) Penguasaan masyarakat terhadap teknologi mutakhir dan ketrampilan-ketrampilan; 3) Aksesibilitas wilayah yang baik; 4) Memiliki pasar yang baik atau dekat dengan pasar; 5) Wilayah yang memiliki sentra-sentra produksi tertentu atau terdapatnya aglomerasi dari kegiatan ekonomi; 6) Ketersediaan buruh yang cukup dan memiliki ketrampilan baik dengan upah yang relatif rendah; 7) Mentalitas masyarakat yang baik untuk pembangunan: jujur, mau terbuka, bekerja keras, dapat diajak kerjasama dan disiplin; dan 8) Kebijakan pemerintah yang mendukung pada terciptanya keunggulan-keunggulan suatu kegiatan ekonomi.

Analisis Shift Share

Menurut Arsyad (1999: 314) analisis "*shift share*" merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Teknik analisis ini biasanya menggunakan data yang umumnya dimiliki suatu wilayah, misalnya output, pendapatan perkapita atau tenaga kerja.

Pertumbuhan daerah pada umumnya dipengaruhi oleh *National Share*, *Propotional Shift*, dan *Differential Shift.Share*. *Componen/National Growth Effect* yaitu pertumbuhan daerah yang dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Jika pertumbuhan daerah sama dengan pertumbuhan rata-rata nasional maka peranannya terhadap nasional akan tetap. *Propotional Shift/Industrial Mix Growth*, yaitu perbedaan antara pertumbuhan daerah dengan penggunaan pertumbuhan nasional sektor dan pertumbuhan daerah dengan penggunaan pertumbuhan nasional total. Daerah dapat tumbuh lebih cepat atau lambat dari nasional. Dengan demikian perbedaan laju pertumbuhan daerah dan nasional disebabkan oleh komposisi sektor yang berbeda (*Component Mix*). *Differential Shift.Share/Regional Share/Competitive Effect*, yaitu perbedaan pertumbuhan daerah secara aktual dengan pertumbuhan daerah. Jika menggunakan pertumbuhan sektoral untuk nasional. Daerah dapat saja mempunyai keunggulan komperatif dibandingkan dengan daerah lain karena

lingkungannya mendorong suatu sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan di sini dapat berarti lahan, tenaga kerja, maupun keahlian tertentu.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Yuliana (2004:64) menerangkan tentang sektor potensial di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan hasil perhitungan LQ sektor berpotensi untuk dikembangkan yakni sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Penelitian yang sama Irman (2002:49) dengan menggunakan data dari tahun 1993-2000 terdapat empat sektor yang menjadi unggulan bagi Kabupaten Lahat dari hasil sektor pertanian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa dan ini merupakan sektor basis bagi Kabupaten Lahat dengan menggunakan hasil perhitungan besaran nilai LQ. Sedangkan berdasarkan hasil analisis *shift share*, sektor ekonomi yang potensial ada 3 (tiga) sektor, yakni sektor industri pengolahan, sektor bangunan, dan sektor listrik, gas, & air minum.

Apriliyanto (2003:56) dengan meneliti identifikasi sektor-sektor ekonomi potensi dan unggulan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yaitu hasil perhitungan LQ, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa.

Marwa (2002: 9) melalui analisis LQ diketahui bahwa sektor basis di Provinsi Sumatera Selatan adalah sektor pertanian, pertambangan migas dan perdagangan. Namun berdasarkan analisis *shift share*, sektor dan sub sektor yang relatif bisa dikembangkan adalah sektor pertanian, subsektor penggalan non migas, subsektor industri migas, sektor perdagangan dan sektor jasa.

Berdasarkan analisis *shift share*, maka untuk sektor ekonomi berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu ada tujuh sektor yaitu sektor pertambangan dan hasil-hasilnya, sektor industri pengolahan, sektor gas, listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Hal ini dikarenakan ke tujuh sektor tersebut berada pada kondisi positif. Hasil perhitungan LQ di Kabupaten OKU pada tahun 1993-2002 terdapat 3 (tiga) sektor yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor pertanian, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa dan menjadi sektor basis bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Anggraini (2001) meneliti potensi sektor ekonomi unggulan di Kota Palembang (Periode 1993-2003) yaitu hasil perhitungan LQ pada tahun 1993 hingga tahun 2003 terdapat enam sektor unggulan yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi semua sektor pada tahun 1993-1996 berlangsung stabil, namun pada tahun 1997-1998 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan mencapai pertumbuhan yang negatif. Hal ini disebabkan karena adanya krisis moneter yang melanda Indonesia. Sedangkan pada tahun 1993-2003 semua sektor ekonomi mulai mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi karena mulai stabilnya keadaan perekonomian pasca krisis moneter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian ekonomi pembangunan dan keuangan daerah yang membahas mengenai masalah yang berhubungan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini memfokuskan studi pada analisis mengenai sektor ekonomi unggulan di

Kabupaten Muara Enim. Periode waktu penelitian dalam 9 tahun terakhir yaitu 2000 sampai 2008.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang dipergunakan diperoleh dari berbagai institusi terkait yang diakui secara sah atau legal untuk menerbitkan data yang diperlukan oleh masyarakat umum, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. Selain itu data juga diperoleh melalui studi pustaka dari beberapa literatur berupa buku teks, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik Analisis yang digunakan dalam tulisan ini antara lain:

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Pendekatan analisis Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor maupun subsektor kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi dan unggulan. Arsyad (1999: 140-141) menjelaskan bahwa teknik LQ ini, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Kegiatan industri yang melayani pasar daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan *industry basic*;
2. Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini dinamakan *industry non basic* atau industri lokal.

Teknik analisis LQ ini merupakan usaha untuk mengukur konsentrasi dari kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian itu dengan peranan kegiatan industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Asumsi yang dipakai dalam teknik analisis LQ adalah sebagai berikut:

1. Pola permintaan di setiap daerah sama dengan pola permintaan secara nasional;
2. Produktivitas setiap pekerja di setiap sektor regional sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional;
3. Perekonomian nasional merupakan perekonomian tertutup.

Meskipun asumsi-asumsi tersebut terdapat kelemahannya, namun paling tidak metode ini mempunyai kebaikan antara lain:

1. Memperhitungkan ekspor yang secara langsung maupun tidak langsung (barang antara);
2. Metode ini tidak mahal dan mudah diterapkan pada data historikal untuk mengetahui trend.

Analisis Location Quotient (LQ) adalah merupakan alat analisis yang mempunyai kepopuleran serta penggunaan berkelanjutan dari pengganda basis ekonomi. Hasil bagi lokasi ini merupakan metode menarik untuk menaksir pendapatan atau kesempatan *basic/ekspor* (Soepono, 2001: 44). Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Arsyad (1999: 141-142) bahwa LQ merupakan alat analisis yang berusaha untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Dalam penelitian ini analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi komoditas-komoditas dominan yang dapat dikategorikan sebagai komoditas basis. Penentuan komoditas dominan pada wilayah penelitian berdasarkan pada kontribusi produksi komoditas tersebut terhadap produksi komoditas di tingkat Kabupaten sebagai daerah referensi. Dengan mengacu pada model pendekatan LQ dapat disajikan bentuk persamaan (Warpani, 1984 :68);

$$LQ = \frac{X_{ir} / PDRBr}{X_{in} / PDRBn} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan: LQ = Koefisien location q; X_{ir} = nilai tambah sektor i di Kabupaten Muara Enim; PDRBr = PDRB Kabupaten Muara Enim; X_{in} = nilai tambah sektor i di Provinsi Sumatra Selatan; dan PDRBn = PDRB Provinsi Sumatra Selatan

Dengan mengambil asumsi bahwa perekonomian acuan adalah perekonomian self-sufficient yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Nilai Location Quotient (LQ) mengandung arti bahwa, untuk :

1. nilai Location Quotient (LQ) suatu komoditas > 1 maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas basic atau unggulan, sehingga perekonomian di suatu kabupaten memiliki kesempatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan daerah akan produk-produk dengan komoditas-komoditas sendiri;
2. nilai Location Quotient (LQ) suatu komoditas < 1 maka komoditas tersebut bukan merupakan komoditas basic atau unggulan sehingga dapat dikatakan kabupaten tersebut kekurangan produk atas komoditas tersebut dan harus mendatangkannya dari daerah lain;
3. Nilai Location Quotient (LQ) suatu komoditas = 1 maka komoditas tersebut mempunyai kontribusi hanya cukup untuk memenuhinya sendiri tanpa mampu memenuhi permintaan akan komoditas tersebut dari luar.

2. Analisis Shift-Share

Analisis Shift and share (analisis pergeseran) digunakan untuk menunjukkan tingkat perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor kegiatan daerah, dan dapat juga digunakan untuk melihat perkembangan dan kedudukan suatu daerah dalam sistem perwilayahan yang lebih luas. Asumsi digunakan dalam pemakaian model ini adalah terdapatnya pengisolasian efek struktur kegiatan ekonomi suatu daerah terhadap pertumbuhannya selama suatu wilayah tertentu (yang diamati). Total Shift-share membandingkan indikator pertumbuhan daerah dengan gambaran-gambaran regional (terhadap daerah yang lebih luas).

Analisis Shift-Share dapat memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam tiga bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu (1) pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan; (2) pergeseran proporsional (proportional shift) mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian yang dijadikan acuan; (3) pergeseran diferensial (differential shift) membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Jika nilai pergeseran diferensial pada suatu daerah bernilai positif, menunjukkan daya saingnya lebih tinggi dari daerah yang dijadikan acuan. Keunggulan kompetitif bernilai positif jika pertumbuhan sektor ekonomi daerah lebih cepat dari pertumbuhan sektor yang sama di tingkat daerah lebih luas yang dijadikan acuan, sebaliknya akan bernilai negatif jika pertumbuhan lebih lambat, serta akan bernilai nol jika pertumbuhan sektor tersebut sama dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat daerah yang dijadikan acuan.

Menurut Soepono 1993 (dalam Almuzani, 2003) alat analisis Shift-share menghendaki pengisolasian pengaruh dari struktur suatu daerah terhadap pertumbuhannya selama periode tertentu. Proses pertumbuhan suatu daerah diuraikan dengan memperhatikan variabel-variabel seperti kesempatan kerja, pendapatan, atau nilai tambah suatu daerah.

Analisis Shift-Share mempunyai empat kegunaan yaitu (1) untuk mengetahui sejauh mana peranan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan; (2) untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap suatu sektor perekonomian; (3) untuk mengetahui komponen yang mempengaruhi nilai tambah atau PDRB di daerah studi; (4) untuk mengetahui

pergeseran ekonomi wilayah studi sebagai akibat perubahan ekonomi wilayah yang lebih luas (referensi).

Teknik ini dikembangkan oleh Creamer yang membagi pertumbuhan sebagai perubah (D) suatu wilayah seperti, kesempatan kerja, nilai tambah selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan nasional (N), bauran industri (M) dan keunggulan kompetitif (C). Untuk menganalisis sektor *i* di wilayah *j* dirumuskan secara matematis sebagai berikut: (Soepono, 1993 dalam Almuzani, 2003).

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Di mana: D_{ij} = laju pertumbuhan PDRB sektor *i* di Kabupaten Muara Enim; N_{ij} = laju pertumbuhan PDRB sektor *i* di Propinsi Sumsel; M_{ij} = laju pertumbuhan PDRB sektor *i* di Propinsi Sumsel akibat bauran industri regional; C_{ij} = keunggulan kompetitif sektor *i* di Kabupaten Muara Enim.

Selanjutnya apabila analisis ini dikembangkan pada pertumbuhan ekonomi, maka:

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij} \dots\dots\dots (3)$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n \dots\dots\dots (4)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n) \dots\dots\dots (5)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (6)$$

di mana: Y^*_{ij} = PDRB sektor *i* Kabupaten Muara Enim pada tahun akhir analisis; Y_{ij} = PDRB sektor *i* Kabupaten Muara Enim pada tahun awal analisis; r_{ij} = Laju pertumbuhan PDRB sektor *i* di Kabupaten Muara Enim; r_{in} = Laju pertumbuhan PDRB sektor *i* di Provinsi Sumsel; dan r_n = Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumsel.

Selanjutnya didefinisikan dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{ij} = (Y^*_{ij} - Y_{ij}) / Y_{ij} \dots\dots\dots (7)$$

$$r_{in} = (Y^*_{in} - y_{in}) / y_{in} \dots\dots\dots (8)$$

$$r_n = (Y^*_n - Y_n) / Y_n \dots\dots\dots (9)$$

di mana: Y_{in} = PDRB sektor *i* PDRB di Propinsi Sumsel; dan Y_n = pertumbuhan PDRB di Propinsi Sumsel.

Seluruh variabel diukur pada tahun dasar dan tanda (*) menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun yang dianalisis. Persamaan Shift–Share Klasik sektor *i* di wilayah *j* adalah:

$$D_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (10)$$

3. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui sampai dimana responsifnya perubahan sektor riil terhadap perubahan sektor jasa digunakan konsep elastisitas. Dengan mengetahui besarnya elastisitas dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi pada sektor jasa apabila terjadi perubahan pada sektor riil. Konsep elastisitas dirumuskan sebagai berikut:

$$Elastisitas = \frac{\text{Perubahan pada sektor jasa}}{\text{perubahan pada sektor riil}} \times \frac{\text{sektor riil}}{\text{sektor Jasa}} \dots\dots\dots (11)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Shift-Share Kabupaten Muara Enim

Analisis Shift-Share merupakan salah satu cara untuk mengetahui nilai kontribusi sektor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat. Dalam penulisan ini menggunakan model Shift-Share Klasik.

Pendekatan alat analisis Shift-Share Klasik mengasumsikan bahwa pertumbuhan perekonomian suatu daerah (Kabupaten Muara Enim) dipengaruhi perekonomian wilayah yang lebih luas (Provinsi Sumsel) terdiri atas komponen pertumbuhan perekonomian (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij). Hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim 2001-2008 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Shift-Share PDRB Kabupaten Muara Enim, 2001-2008 (juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Nij	Mij	Cij	Dij
1	Pertanian	328.836	73.364	236.600	638.202
2	Pertambangan dan Hasil-hasilnya	1.311.527	-2.124.168	652.589	749.948
3	Industri Pengolahan	144.545	4.004	79.582	228.131
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	8.770	2.649	-4.477	6.942
5	Bangunan / Konstruksi	69.668	47.089	2.904	119.661
6	Perdagangan	96.229	59.865	-4.969	151.124
7	Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa	26.342	50.459	-37.281	39.520
8	Perusahaan	24.293	16.028	-10.415	29.906
9	Jasa-jasa	26.887	49.982	-42.293	99.323
PDRB		2.101.247	-910.728	872.240	2.062.758

Sumber: Lampiran 5, 6, dan 7

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Muara Enim periode 2001-2008 sebesar Rp 20.062.758,00 juta atau meningkat 37,18 persen. Peningkatan ini terjadi hampir pada semua sektor dan yang terbesar adalah sektor Pertambangan dan hasil-hasilnya Rp 749.948,00 juta, sektor Pertanian Rp 638.202,00 juta, Industri Pengolahan Rp. 228.131,00 juta, Perdagangan Rp 96.229,00 juta. Pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Rp 8.770,00 juta.

Secara persentase pertumbuhan tertinggi dimiliki sektor Pengangkutan dan Komunikasi 108,40 persen, Keuangan, Bangunan 62,31 persen, Persewaan dan Jasa Perusahaan 61,71 persen, sektor Perdagangan 60,31 persen, Jasa-Jasa 57,46 persen, Listrik, Gas dan Air Bersih 48,41 persen, Pertanian 45,49 persen, dan Pertambangan 2,76 persen.

Dari hasil pengolahan dan perhitungan data periode 2001 – 2008 diperoleh gambaran bahwa perubahan nilai PDRB pada tingkat Provinsi tumbuh sebesar 37,18 sedangkan untuk Kabupaten Muara Enim sebesar 36,50 persen. Ini berarti selama kurun waktu tersebut secara total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan pada tingkat Provinsi.

Subsektor yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah subsektor Angkutan Udara Rp 238.489 juta dan Pertambangan Tanpa Gas Rp 67.446 juta merupakan subsektor yang menempati urutan paling kecil. Secara persentase subsektor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah subsektor Minyak dan Gas Bumi (743,67 persen), Pertambangan Tanpa Migas (35,72 persen) dan Jasa Penunjang Komunikasi (32,60 persen).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2001-2008 sebesar Rp 2.101.247,00 juta.

Pengaruh yang terbesar yaitu sektor Pertambangan sebesar Rp 1.311.527,00 juta, Pertanian Rp. 328.836,00 juta, Industri Pengolahan Rp 144.545,00 juta, Perdagangan Rp 914.426 juta, Bangunan dan Konstruksi Rp 69.668,00 juta, Jasa-Jasa Rp. 26.887,00 juta, Pengangkutan dan Komunikasi Rp 26.342,00 juta dan yang terkecil yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar Rp 8.770,00 juta.

Pada tahun 2001 sampai dengan 2008 secara umum bauran industri berpengaruh negatif terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 910.728,00,00 juta. Pengaruh terbesar terjadi pada sektor Pertambangan negatif Rp 2.124.168,00 juta, walaupun kedelapan sektor yang lain mempunyai pengaruh positif tetapi nilai totalnya masih kecil daripada nilai sektor pertanian sehingga total PDRB masih bernilai negatif. Kedelapan sektor yang memberikan pengaruh yang positif terhadap pengaruh pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim, yaitu : sektor Pertanian, sektor industri pengolahan, sektor Listrik, Gas, dan Air bersih, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Pengaruh positif terhadap PDRB yang terbesar pada sektor Pertanian yaitu Rp. 73.364,00 juta, sedangkan yang terkecil pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Rp. 2.649,00 juta.

Selanjutnya jika dilihat dari hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa untuk sektor ekonomi Kabupaten Muara Enim yang mempunyai kedudukan potensial untuk dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif terdapat 5 (lima) sektor yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan dan Hasil-Hasilnya, Industri Pengolahan dan sektor Bangunan. Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif terbesar jika dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pertambangan dan Hasil-Hasilnya Rp. 652.589,00 juta, Industri Pengolahan Rp. 79.582,00 juta, Sektor Pertanian Rp.236.600,00 juta, dan sektor Bangunan Rp. 2.904,00 juta. Sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dan mengurangi pertumbuhan PDRB yaitu sektor Jasa-jasa negatif Rp 42.293,00 juta, Pengangkutan dan Komunikasi (Rp -537.281,00 juta), Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan (Rp -10.415,00 juta), Perdagangan (Rp -4.969,00 juta), dan Listrik, Gas dan Air Bersih (Rp. 4.477,00 juta).

2. Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Muara Enim

Perkembangan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komperatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Keunggulan komperatif suatu daerah dapat digunakan dalam menentukan kebijakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komperatif.

Pada umumnya perhitungan Location Quotient (LQ) ini digunakan untuk melihat keunggulan sektoral dari suatu daerah dibanding daerah lainnya, disamping sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu sektor digolongkan ke dalam sektor basis atau sektor bukan basis. Besaran nilai LQ dapat digunakan sebagai indikator awal untuk melihat sektor-sektor ekonomi yang potensial (apakah memiliki atau tidak tidak memiliki keunggulan) sektoral dibandingkan dengan keadaan secara rata-rata pada tingkat nasional (dalam hal ini Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan Provinsi Sumatra Selatan).

Konsep LQ menyatakan bahwa bila besaran LQ pada suatu sektor lebih besar dari satu ($LQ > 1$) maka sektor ekonomi ini merupakan sektor basis yang memiliki keuntungan lokasi di daerah yang bersangkutan dan kemampuan untuk mengekspor ke wilayah lain. Sektor ini sangat potensi untuk dikembangkan dan dapat menjadi tumpuan perkembangan ekonomi. Sebaliknya bila besaran LQ lebih kecil dari satu ($LQ < 1$) maka menandakan bahwa sektor tersebut bukanlah sektor basis. Sektor ini tidak memiliki keuntungan lokasi dan cenderung mengimpor dari wilayah lain karena tidak mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Muara Enim dan PDRB Provinsi Sumatra Selatan selama kurun waktu 2000 - 2008, maka diperoleh besaran LQ masing masing sektor ekonomi di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2. Perhitungan LQ Kabupaten Muara Enim tahun 2001-2008

Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Rerata
1. Pertanian	0,92	0,50	0,49	0,47	0,46	0,44	0,44	0,44	0,52
- Tanaman Bhn Makanan	0,90	0,92	0,95	0,97	1,01	1,04	1,10	1,16	1,01
- Kehutanan	0,84	0,90	0,95	0,99	1,04	1,11	1,19	1,22	1,03
2. Pertambangan & hasil ² nya	2,03	2,03	2,03	2,07	2,18	2,25	2,33	2,37	2,16
- Minyak dan Gas Bumi	1,57	1,57	1,56	1,61	1,75	1,83	1,92	1,96	1,72
- Pertambangan tanpa migas	6,12	6,29	6,34	6,20	5,88	5,80	5,84	5,84	6,04
- Penggalian	0,96	0,99	0,99	0,99	13,67	12,92	12,33	12,11	6,87
3. Industri Pengolahan	0,34	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	0,46	0,43
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,93	0,91	0,90	0,88	0,86	0,84	0,82	0,82	0,87
- Listrik	1,09	1,09	1,07	1,05	1,02	0,98	0,97	0,98	1,03
5. Bangunan	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,31	0,29	0,27	0,25	0,31	0,29	0,27	0,25	0,25
- Angkutan Rel	3,10	3,12	3,16	3,23	3,49	3,56	3,80	3,85	3,41
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,32
9. Jasa- Jasa	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,58	0,57	0,56	0,60

Sumber : Muara Enim dalam angka dan Sumsel Dalam Angka, Tahun 2007/2008 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2, dari sembilan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Muara Enim hanya terdapat tiga sektor yang dikategorikan sebagai unggulan, yaitu sektor pertanian pada sub sektor tanaman bahan makanan, kehutanan, sektor pertambangan dan hasil-hasilnya, sub sektor listrik, sektor pengangkutan pada subsektor angkutan rel. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata koefisien LQ yang dimiliki sektor tersebut lebih besar dari satu yaitu masing-masing 1,01, 1,03, 2,16, 1,72, 6,04, 6,87, 1,03, dan 3,41 pada sub sektor tanaman bahan makanan, kehutanan, sektor pertambangan dan hasil-hasilnya termasuk tiga sub sektornya yaitu subsektor minyak dan gas bumi, pertambangan tanpa migas, dan penggalian, sub sektor listrik, sektor pengangkutan pada subsektor angkutan rel.

Pada tahun 2008 sektor pertambangan dan hasil-hasilnya (nilai LQ = 12,11) yang terdiri dari sub sektor minyak dan gas bumi, pertambangan tanpa migas, dan penggalian menunjukkan nilai koefisien LQ > 1 masing-masing 1,96; 5,84; dan 12,11. Sektor penggalian ini adalah penyumbang terbesar dari seluruh sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Muara Enim, baik dengan migas maupun tanpa migas. Dalam komposisi dengan migas, peranan dominan sektor pertambangan dibentuk oleh dominasi produk migas, sementara dalam komposisi tanpa migas, sumbangan batubara bahan galian golongan C yang masih cukup dominan.

Sektor pengangkutan terutama berasal dari sub sektor angkutan rel memiliki rata-rata nilai LQ >1, yaitu 3,41. Sektor pertanian dengan subsektor tanaman bahan makanan dengan nilai LQ = 1,16; dan subsektor kehutanan dengan nilai LQ = 1,22. Namun untuk tiga sub sektor lainnya masih menunjukkan rata-rata nilai LQ < 1 sehingga untuk sektor pertanian secara keseluruhan masih menunjukkan nilai LQ < 1 yaitu 0,52. Sementara ke tujuh sektor lainnya hanya memiliki besaran LQ yang lebih kecil dari satu (LQ < 1) yaitu sektor industri pengolahan, bangunan, sektor perdagangan, hotel & restoran, pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa . Hal ini menandakan bahwa ke ketujuh sektor tersebut belum merupakan sektor basis dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim masih rendah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus lebih serius memperhatikan pertumbuhan sektor tersebut.

Bila dilihat rata-rata koefisien LQ, pada sektor pertambangan sebesar 2,16 di mana pertumbuhannya juga cukup stabil. Keunggulan sektor ini dipengaruhi oleh faktor sumber

daya alam yang dimiliki Kabupaten Muara Enim, terutama pada sub sektor penggalian dan pertambangan tanpa migas. Sementara pada sektor pengangkutan, nilai koefisien LQ-nya hanya berkisar 0,25 per tahun. Kemudian sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan termasuk kecil dengan nilai koefisien LQ-nya hanya berkisar 0,32. Oleh karena itu peran pemerintah seharusnya lebih giat sehingga di masa mendatang sektor ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dan dapat menjadi sektor unggulan bagi perekonomian Kabupaten Muara Enim. Begitu juga dengan sektor ekonomi lainnya, dengan nilai koefisiennya masih kurang dari satu ($LQ < 1$) menandakan bahwa pengelolaan sektor tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

Analisis shift share mencoba melihat perubahan indikator suatu daerah dibandingkan dengan perubahan secara nasional. Perubahan pada pertumbuhan (shift) tersebut dibagi 3 komponen, yaitu : 1) Pertumbuhan Nasional (N), 2). Pertumbuhan proporsional atau “industry mix growth component (M)”, 3) Pertumbuhan pangsa wilayah atau “ Regional share growth component (C).

Berdasarkan analisis shift share terdapat empat yang menjadi sektor berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif (Differential shift) yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan dan Hasil-Hasilnya, Industri Pengolahan dan sektor Bangunan selama 9 (sembilan) tahun keempat sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Muara Enim. Ini ditunjukkan dengan nilai shift share yang positif.

Sementara itu, keunggulan kompetitif lebih menekankan efisiensi pengelolaan (manajemen : perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan). Penggunaan sumber-sumber tersebut dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi.

Tabel 3. Sektor Unggulan Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 – 2008

Location Quotient	Shift Share
1. Sektor Pertanian - Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan - Sub Sektor Kehutanan 2. Sektor Pertambangan dan Hasil-hasilnya 3. Sektor Listrik, Gas & Air Bersih - Listrik 4. Sektor Pengangkutan & Komunikasi - Angkutan Rel	1. Sektor Pertanian 2. Sektor Pertambangan dan Hasil-Hasilnya 3. Sektor Industri Pengolahan 4. Sektor Bangunan

3. Analisis Elastisitas

Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan pada sektor riil terhadap perubahan sektor riil. Dari hasil perhitungan pada Lampiran 11 diperoleh angka elastisitas sebesar 5,64, hal ini berarti setiap perubahan sebesar satu persen pada sektor riil maka sektor jasa akan meningkat sebesar 5,64 persen. Analisis ini mendukung hasil yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan LQ dan Shift Share yang dilakukan sebelumnya yang secara eksplisit terlihat bahwa sektor jasa mampu menjadi sektor andalan dan mempunyai keunggulan komperatif.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil perhitungan *Location Quotient (LQ)* menunjukkan bahwa selama periode 2001-2008, Kabupaten Muara Enim memiliki sektor unggulan, yaitu sektor pertanian terutama pada

subsektor Tanaman Bahan Makanan sebesar 1,16, sub sektor Kehutanan sebesar 1,22, Sektor Pertambangan dan Hasil-hasilnya dengan sub sektor minyak dan gas bumi sebesar 1,96, pertambangan tanpa migas sebesar 5,84, dan penggalian sebesar 12,11. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi terutama sub sektor Angkutan Rel sebesar 3,41.

Terdapat perbedaan dari analisis LQ yang menjadi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk menjadi sektor andalan di Kabupaten Muara Enim berdasarkan analisis *shift share* yaitu pada periode 2001-2008. Sektor ekonomi Kabupaten Muara Enim mempunyai sektor yang potensial pada 4 (empat) sektor yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Hasil-hasilnya, sektor Industri Pengolahan dan sektor Bangunan. Hal ini ditandai dengan *shift share* yang bernilai positif.

Angka elastisitas sebesar 5,64, hal ini berarti setiap perubahan sebesar satu persen pada sektor riil maka sektor jasa akan meningkat sebesar 5,64 persen. Analisis ini mendukung hasil yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan LQ dan *Shift Share* yang dilakukan sebelumnya yang secara eksplisit terlihat bahwa sektor jasa mampu menjadi sektor andalan dan mempunyai keunggulan komperatif.

Saran-Saran

1. Sektor pertambangan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Muara Enim. dikarenakan tiga subsektor pada sektor ini memberikan kontribusi yang paling besar pada PDRB dibandingkan dengan sektor lain. Oleh karena itu sektor ini harus menjadi prioritas untuk diberdayakan, sehingga benar-benar menjadi kokoh dan mampu menopang perekonomian masyarakat pada umumnya.
2. Untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Muara Enim perlu diadakan identifikasi sektor-sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang lambat agar pada masa yang akan datang dapat menjadi sektor-sektor potensial dan diunggulkan melalui kebijakan pengembangan sektor tersebut secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, Rika, 2001, *Potensi Sektor Ekonomi Unggulan di Kota Palembang (Periode 1993-2003)*. Skripsi. Palembang. UNSRI
- Apriliyanto, 2003, *Identifikasi Potensi Ekonomi Kota Pekalongan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.1, No.1 Maret 2003 :39051, BPFE-Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1999, *Ekonomi Pembangunan* Edisi Keempat, Yogyakarta, STIE YKPN.
- _____, 1999, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Sumsel Dalam Angka Berbagai Edisi.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Muara Enim Dalam Angka Berbagai Edisi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Muara Enim, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Muara Enim Tahun 2004-2009.
- Bank Indonesia, 2005-2008, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah*, Vol III N0.4, Desember 2008
- Boediono, 1992, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Dumairy, 1999. *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Jhingan, M.I. 1999, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerbit : Rajawali Press, Yakarta.
- Jumarsa, 2006. *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.

- Kuncoro Mudrajad, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan*. Dalam Prisma, April 1995, LP3ES, Jakarta.
- _____, 2000, *Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Marwa, Taufiq dan Syirod Saleh, 2002, *Potensi Relatif Sektor-sektor Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan*, Kajian Ekonomi Vol 1 No 1, Tahun 2002 (1-13), Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Musgrave, Richard.A dan Peggy B Musgrave, 1991, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Musgrave, Richard A, 1959, *The Theory of Public Finance*, International Student Edition. McGraw W Hill Kogakusha, LTd.
- Muzamil, 2001. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas*. Tesis. Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.
- Richardson H.W, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Syafrizal, 1997, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Prisma, LP3ES, No.3, Tahun 2006 (26-38), UNSRI, Palembang.
- Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, LPFE, UI, Jakarta
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Supranto, J, 2000, *Statistik, Teori, dan Aplikasi*, Jilid I, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Susanti, H., Moh. Iksan dan Widyanti, 2000, *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, LPFE-UI, Jakarta.
- Todaro, Michael, 2004, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yuliana, 2001. *Analisis Sektor Potensial Kabupaten OKU Sumatera Selatan*. Tesis, Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.
- Zen, Kosasi, M. Taufik, 2004, *Pengaruh Potensi Ekonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, Vol.6, No.1 Februari 2004, Program Pascasarjana UNSRI.